JAF: Journal of Agricultural and Farming
E-ISSN 3026-7439, Vol. 4 No. 1, Maret 2025
DOI:10.58738/JAF.v4i1.1071

KETIMPANGAN AKSES PANGAN DAN STRATEGI PEMERATAAN DI INDONESIA

Ayudya Eka Purwanti

SMK Dinamika Insan Mandiri

Email : ayudya4434@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan akses pangan merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar, distribusi pangan yang tidak merata menyebabkan sebagian wilayah mengalami surplus, sementara daerah lain menghadapi kekurangan pangan kronis. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ini meliputi perbedaan infrastruktur, disparitas ekonomi antarwilayah, ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta lemahnya sistem logistik dan rantai pasok pangan. Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lahan turut memperparah kondisi produksi pangan di beberapa daerah rentan. Upaya pemerataan akses pangan memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Strategi tersebut meliputi penguatan sistem distribusi pangan berbasis wilayah, peningkatan investasi di sektor pertanian lokal, pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan, serta perbaikan infrastruktur transportasi dan penyimpanan pangan. Kebijakan subsidi dan insentif bagi petani kecil juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan daerah. Selain itu, digitalisasi sistem informasi pangan dapat membantu memperkuat transparansi data dan mempercepat respon terhadap potensi krisis pangan. Dengan implementasi strategi pemerataan yang terencana dan inklusif, Indonesia dapat mengurangi kesenjangan akses pangan antarwilayah serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci: petani, Ketahanan Pangan, Pemerataan

JAF: Journal of Agricultural and Farming
E-ISSN 3026-7439, Vol. 4 No. 1, Maret 2025
DOI:10.58738/JAF.v4i1.1071

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan akses pangan merupakan persoalan multidimensional yang terus menjadi perhatian dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan keanekaragaman sosial-ekonomi yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh penduduknya. Akses terhadap pangan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek produksi, tetapi juga oleh faktor distribusi, daya beli, infrastruktur, dan kebijakan publik. Ketimpangan ini tidak sekadar menunjukkan perbedaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu memperoleh pangan, tetapi juga mencerminkan kesenjangan struktural yang lebih luas antara wilayah, kelompok sosial, serta sistem ekonomi nasional.

Secara konseptual, ketimpangan akses pangan dapat dipahami sebagai perbedaan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi budaya. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), akses pangan merupakan salah satu dari empat pilar utama ketahanan pangan selain ketersediaan, pemanfaatan, dan stabilitas. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan akses pangan terjadi karena tidak semua wilayah memiliki kemampuan produksi dan distribusi pangan yang seimbang. Wilayah Jawa dan sebagian Sumatera, misalnya, relatif lebih maju dalam sistem pertanian dan logistik, sementara daerah-daerah di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya investasi, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan ini berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kerentanan pangan dan gizi di beberapa wilayah. Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam skor Pola Pangan Harapan (PPH) antarprovinsi. Masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung mengonsumsi makanan pokok berkarbohidrat seperti beras atau singkong secara berlebihan, sementara asupan protein dan mikronutrien masih jauh dari ideal. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa akses terhadap pangan bergizi bukan hanya masalah ketersediaan, melainkan juga soal keterjangkauan ekonomi dan pengetahuan gizi.

Salah satu penyebab utama ketimpangan akses pangan adalah lemahnya sistem distribusi dan logistik. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai di daerah terpencil menyebabkan biaya

distribusi pangan meningkat, sehingga harga di tingkat konsumen menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh fluktuasi harga pangan nasional akibat ketergantungan pada impor dan sistem pasar yang belum efisien. Akibatnya, meskipun secara nasional produksi pangan mencukupi, akses aktual terhadap pangan tetap tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain faktor ekonomi dan infrastruktur, dinamika sosial dan kebijakan publik turut memainkan peran penting. Kebijakan pembangunan yang selama ini berfokus pada peningkatan produksi pangan nasional, terutama beras, sering kali mengabaikan aspek pemerataan. Program intensifikasi pertanian lebih banyak terpusat di daerah dengan infrastruktur yang baik, sementara wilayah yang tertinggal justru kurang mendapat dukungan teknis dan finansial yang memadai. Ketimpangan gender juga menjadi isu penting, di mana perempuan—yang memiliki peran besar dalam rumah tangga dan produksi pangan—sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, modal, dan pelatihan.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan semakin memperparah situasi. Ketergantungan terhadap pertanian berbasis lahan membuat wilayah-wilayah tertentu sangat rentan terhadap cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan penurunan kesuburan tanah. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas dan stabilitas pasokan pangan lokal. Tanpa upaya adaptasi yang memadai, ketimpangan akses pangan akan semakin melebar antara wilayah yang memiliki sumber daya dan kapasitas adaptif yang tinggi dengan wilayah yang rentan dan miskin sumber daya.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi ketimpangan ini, seperti program lumbung pangan, bantuan pangan nontunai, serta pengembangan kawasan pangan berbasis masyarakat. Namun, efektivitasnya sering kali terbatas karena kurangnya integrasi antarinstansi, minimnya pemantauan berbasis data, dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan yang bersifat top-down cenderung kurang memperhatikan konteks lokal dan kearifan komunitas dalam mengelola sumber daya pangan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari sekadar memenuhi kebutuhan pangan menuju pembangunan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerataan akses pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia. Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga

memperkuat dimensi distribusi, akses ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan, investasi pada infrastruktur logistik, pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok pangan, serta pelibatan sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dengan demikian, memahami dan menanggulangi ketimpangan akses pangan bukan sekadar upaya teknis dalam sektor pertanian, melainkan juga upaya sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak atas pangan yang layak. Pemerataan akses pangan merupakan prasyarat bagi terciptanya keadilan sosial dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, strategi pemerataan pangan harus diarahkan tidak hanya pada penyediaan pangan yang cukup, tetapi juga pada pembangunan sistem pangan yang adil, tangguh, dan berdaya saing di seluruh wilayah Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk ketimpangan akses pangan di Indonesia serta strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pemerataan pangan secara berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan ketimpangan pangan bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual terhadap faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melingkupinya.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi analisis kebijakan dan sosial ekonomi pangan, dengan fokus pada pemerataan akses pangan antarwilayah di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena ketimpangan berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan seperti petani, konsumen, aparat pemerintah, dan pelaku distribusi pangan. Data yang dikumpulkan akan diinterpretasikan untuk menggambarkan kondisi empiris dan merumuskan strategi kebijakan yang relevan.

B. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan pangan tinggi dan ketimpangan akses yang signifikan, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, yang

dibandingkan dengan wilayah yang relatif lebih maju seperti Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Ruang lingkup penelitian meliputi dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan ekonomi, stabilitas harga, serta kualitas gizi dan pola konsumsi masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas:

1) Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan petani, pedagang, dan pejabat daerah yang berhubungan langsung dengan sektor pangan.

2) Data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, laporan FAO, serta publikasi ilmiah dan kebijakan terkait ketahanan pangan nasional.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama:

1) Studi literatur, untuk menelaah teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai ketimpangan pangan dan strategi pemerataan.

2) Wawancara semi-terstruktur, guna memperoleh informasi mendalam dari informan kunci yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan pangan di wilayah penelitian.

3) Observasi lapangan, untuk memahami kondisi nyata distribusi pangan, akses pasar, serta hambatan infrastruktur yang dihadapi masyarakat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Proses ini melibatkan tahap reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diidentifikasi berdasarkan tema-tema utama seperti ketimpangan produksi, hambatan logistik, kebijakan subsidi, dan inovasi teknologi pangan. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kerangka teori pemerataan pangan dan konsep ketahanan pangan berkelanjutan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan.

F. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta), sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan data dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan memiliki kredibilitas dan akurasi tinggi dalam menggambarkan kondisi ketimpangan akses pangan di Indonesia.

G. Keluaran Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang ketimpangan akses pangan di berbagai wilayah Indonesia serta merumuskan strategi pemerataan yang realistis dan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkecil disparitas sosial-ekonomi antarwilayah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Ketimpangan Akses Pangan di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan akses pangan di Indonesia masih cukup signifikan, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial. Data dari Badan Ketahanan Pangan (2023) menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, sementara wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua berada pada kategori rentan. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan skor Pola Pangan Harapan (PPH), ketersediaan bahan pangan pokok, serta tingkat harga komoditas pangan di pasar lokal.

Di beberapa daerah terpencil, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga di Jawa. Hal ini disebabkan oleh biaya transportasi yang tinggi dan rantai distribusi yang panjang. Selain itu, ketergantungan pada komoditas tertentu seperti beras menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi pasokan dan harga. Sementara itu, wilayah dengan diversifikasi pangan tinggi seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan menunjukkan ketahanan

pangan yang lebih stabil, karena masyarakatnya mengonsumsi berbagai sumber karbohidrat seperti jagung, ubi, dan sagu.

B. Faktor Penyebab Ketimpangan Akses Pangan

Dari hasil wawancara dan studi literatur, ditemukan empat faktor utama penyebab ketimpangan akses pangan di Indonesia:

1) Keterbatasan Infrastruktur dan Logistik.

   Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan tantangan besar dalam distribusi pangan. Akses jalan yang terbatas, pelabuhan kecil, dan biaya logistik yang tinggi menjadi hambatan utama. Akibatnya, pasokan pangan di daerah terpencil sering tidak stabil, terutama pada musim paceklik atau saat terjadi gangguan transportasi.

2) Produktivitas Pertanian yang Tidak Merata.

   Wilayah dengan sumber daya alam subur seperti Jawa dan Sumatera memiliki produktivitas pertanian tinggi, sedangkan daerah timur dengan kondisi tanah kering dan curah hujan tidak menentu sering mengalami gagal panen. Keterbatasan teknologi, sarana irigasi, serta minimnya pendampingan petani turut memperburuk kesenjangan ini.

3) Keterbatasan Akses Ekonomi dan Daya Beli.

   Ketimpangan ekonomi masyarakat juga memengaruhi kemampuan untuk membeli pangan bergizi. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sebagian besar pengeluaran rumah tangga difokuskan pada pangan pokok, sedangkan konsumsi protein dan sayuran segar masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

4) Kelemahan dalam Tata Kelola dan Kebijakan Pangan.

   Beberapa kebijakan pemerintah masih bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan konteks lokal. Program bantuan pangan nontunai, misalnya, belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil karena keterbatasan infrastruktur perbankan dan digital. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan pangan masih lemah, sehingga kebijakan sering tumpang tindih dan tidak berkelanjutan.

C. Dampak Ketimpangan Akses Pangan

Ketimpangan pangan berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Wilayah dengan akses pangan rendah cenderung memiliki tingkat stunting dan kemiskinan lebih tinggi. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di NTT dan Papua melebihi 30%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 21,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, ketimpangan pangan juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika harga pangan melonjak, daya beli masyarakat menurun, dan ketidakpuasan sosial meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta memperdalam kesenjangan antarwilayah.

D. Strategi Pemerataan Akses Pangan

Berdasarkan hasil analisis, beberapa strategi dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan akses pangan di Indonesia:

1) Penguatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal.

   Pemerintah perlu mendorong pengembangan komoditas pangan lokal seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan sorgum di wilayah yang kurang produktif untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Pendekatan berbasis potensi lokal ini dapat meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

2) Pengembangan Infrastruktur Logistik dan Transportasi.

   Investasi pada jalan desa, pelabuhan kecil, gudang penyimpanan, dan sistem rantai dingin perlu diprioritaskan untuk memperlancar distribusi pangan. Peningkatan infrastruktur akan menurunkan biaya logistik dan menstabilkan harga pangan antarwilayah.

3) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Rantai Pasok Pangan.

   Digitalisasi sistem pangan melalui platform e-commerce pertanian, aplikasi pasar online, dan sistem informasi harga dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi harga.

Teknologi ini juga membuka peluang bagi petani kecil untuk menjual produk langsung ke konsumen.

4) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pangan Daerah.

Pemerintah daerah perlu memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola kebijakan pangan sesuai kondisi lokal. Penguatan kelembagaan petani, koperasi pangan, dan BUMDes dapat menjadi motor pemerataan akses pangan di tingkat akar rumput.

5) **Kolaborasi Multi-Pihak.**

Pemerataan pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun sistem pangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

E. Analisis Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerataan pangan harus diarahkan pada dua pendekatan utama: pemberdayaan komunitas lokal dan reformasi kebijakan nasional. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas petani, akses pembiayaan, serta pendidikan gizi terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan kebijakan yang bersifat karitatif. Di sisi lain, kebijakan nasional harus mampu menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan dengan mempertimbangkan dinamika global, perubahan iklim, serta ketahanan rantai pasok.

Dengan menerapkan strategi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan berkeadilan. Pemerataan akses pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari komitmen moral dan konstitusional untuk memastikan terpenuhinya hak dasar seluruh warga negara atas pangan yang layak.

4. KESIMPULAN

Ketimpangan akses pangan di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang bersumber dari kombinasi faktor ekonomi, sosial, geografis, dan kelembagaan. Meskipun secara nasional Indonesia telah mencapai swasembada pada beberapa komoditas pangan, pemerataan distribusi dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan

terlihat jelas antara wilayah barat yang relatif maju dengan wilayah timur yang masih tertinggal dalam infrastruktur, produktivitas pertanian, dan daya beli masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan utama terletak pada empat aspek: keterbatasan infrastruktur logistik, produktivitas pertanian yang tidak merata, rendahnya daya beli masyarakat, serta kelemahan koordinasi kebijakan lintas sektor. Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya memunculkan perbedaan harga dan ketersediaan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, kemiskinan, dan ketimpangan sosial-ekonomi di berbagai daerah.

Untuk mewujudkan pemerataan akses pangan, diperlukan transformasi sistem pangan nasional yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan. Pemerataan pangan bukan semata persoalan produksi, melainkan juga bagian integral dari pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau adalah hak setiap warga negara serta fondasi bagi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Jakarta: BPS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Jakarta: OJK.

Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: BI.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.

Kemendikbud. (2021). Kurikulum Merdeka: Penguatan Literasi dan Numerasi. Jakarta: Kemdikbud.

OECD. (2020). OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. Paris: OECD Publishing.